

UPAYA UNICEF DALAM PEMENUHAN HAK ANAK KORBAN TSUNAMI DI ACEH TAHUN 2004-2010

Farah Almira Asbar

Jurusan Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Email: farah.almira.2014@fisipol.umy.ac.id

ABSTRAK

Hak asasi merupakan suatu hal yang harus didapatkan oleh setiap orang, seperti kesempatan untuk hidup, kesempatan untuk merdeka, dan lainnya. Terutama dalam situasi-situasi tertentu seperti saat sedang terjadi bencana alam, dimana menjadi kewajiban moral bagi orang lain yang sedang berada dalam keadaan aman untuk membantu memenuhi hak mereka yang menjadi korban. Pasca terjadinya tsunami di Aceh banyak anak-anak yang masih bertahan hidup yang kemudian wajib dipenuhi haknya agar mereka dapat melangsungkan dan melanjutkan hidup. Selain Negara yang harus menjamin keamanan warganya, keamanan manusia juga bias dilakukan oleh lembaga-lembaga yang berkaitan. UNICEF turun kelapangan untuk membantu memulihkan kondisi anak-anak korban tsunami di Aceh. Ancaman akan keamanan manusia dibenahi dengan adanya aksi-aksi kemanusiaan yang dapat memenuhi hak-hak setiap individu. Oleh karena itu, dalam jurnal ini akan dijelaskan lebih jauh upaya-upaya apa saja yang dilakukan UNICEF dalam memenuhi hak anak korban tsunami di Aceh.

Human rights are something that everyone has to get, such as opportunities for life, opportunities for independence, and more. Especially in certain situations such as during a natural disaster, which becomes a moral duty for others who are in a safe state to help fulfill the rights of those who are victims. After the tsunami in Aceh many surviving children are then obliged to fulfill their right so that they can continue and live. In addition to the State that must ensure the security of its citizens, human security is also biased by relevant institutions. UNICEF came to the field to help restore the condition of tsunami-affected children in Aceh. Threats to human security are addressed by humanitarian actions that can fulfill the rights of individuals. Therefore, in this journal will be explained further what efforts are made by UNICEF in fulfilling the rights of tsunami victims children in Aceh.

Keywords: *Human Security, Humanitarian Action, Child's Right, Disaster*

LEMBAR PENGESAHAN NASKAH PUBLIKASI

Naskah Publikasi dengan Judul:

**Upaya UNICEF dalam Pemenuhan Hak Anak Korban
Tsunami Aceh Tahun 2204-2010**

Farah Almira Asbar
20140510348

Yang Disetujui



Drs. Husni Amriyanto P., M.Si.
Dosen Pembimbing

Pendahuluan

Indonesia merupakan Negara kepulauan yang berada pada jalur *Ring of Fire*, merupakan zona dimana terdapat banyak aktifitas seismik. Negara yang terletak pada posisi ini terkenal rawan terhadap berbagai bencana alam seperti gempa bumi, tsunami, meletus gunung berapi, dan lain lain. Salah satu bencana alam dahsyat yang menimpa Indonesia adalah Tsunami, yang terjadi di Aceh pada tahun 2004 silam. Hingga sehari setelah terjadinya peristiwa tersebut Perserikatan Bangsa-Bangsa menyatakan bahwa hal ini merupakan bencana kemanusiaan terbesar yang pernah terjadi. Pada peristiwa tsunami tersebut, 236.116 jiwa meninggal dunia dan 74.000 dinyatakan hilang karena jasadnya tidak diketemukan. Selain itu, terdapat 514.150 jiwa yang secara spontan menjadi pengungsi karena kehilangan rumah dan tempat tinggal. Kehilangan karena peristiwa Tsunami memberikan dampak buruk baik fisik maupun psikologis bagi anak-anak.

Infrastruktur serta bangunan-bangunan mengalami kerusakan cukup parah. Jalanan terbelah, banyak jembatan roboh, rumah-rumah yang rata dengan tanah, terutama rumah-rumah yang berlokasi dekat dengan laut, hancurnya perindustrian. Musibah gempa dan tsunami yang terjadi setidaknya telah menghancurkan dua belas wilayah (kabupaten dan kota) di Aceh, banyaknya kerugian baik nyawa maupun harta dalam peristiwa ini. Kehilangan sanak saudara, harta benda, tempat tinggal, serta fasilitas umum yang sudah tidak dapat lagi digunakan pasca musibah tersebut. Proses pengembalian segala kerusakan yang ada di Aceh tidak bias memakan waktu yang sebentar. Pembangunan yang terjadi di Aceh banyak dibantu oleh pihak asing dikarenakan kebutuhan sarana prasarana yang tidak sedikit. Anak-anak yang menjadi korban dan selamat atas musibah ini tentunya juga harus diselamatkan hidupnya kedepan, oleh karena itu banyak anak-anak yang diadopsi dan diasuh oleh orang-orang di luar Aceh, dan tidak jarang pula orang asing yang mengadopsi anak-anak korban Tsunami di Aceh. Peristiwa ini sangat menjadi sorotan dunia, karena wilayah yang terkena musibah mencakup beberapa negara.

Mendapatkan kesempatan hidup merupakan hak setiap orang. Mereka yang masih hidup walaupun telah kehilangan segala sesuatunya juga tetap membutuhkan bantuan dan perawatan agar pulih dan melanjutkan kehidupannya kedepan. Dalam sebuah bencana alam tidak hanya orang dewasa saja yang menjadi korban dan terkena masalah. Bagaimana dengan

nasib anak-anak? Mereka yang masih dibawah umur, yang pola pikirnya tidak sebaik dan sejernih orang dewasa, mereka yang sebelumnya tidak banyak menanggung beban lebih banyak dari orang dewasa karena rutinitas harian yang biasa terprediksi, dan mereka yang setiap hari mendapatkan perlindungan hingga perawatan dalam hal pangan hingga tempat tinggal. Dalam tulisan ini akan difokuskan pada bantuan-bantuan penanganan terhadap. Siapa yang disebut anak-anak, bagaimana kondisinya pasca tsunami, upaya dalam hal kesehatan dan pendidikan apa yang dilakukan untuk mereka melanjutkan hidup.

Penggolongan dan definisi Anak

Ada beberapa kelompok anak yang memerlukan perlindungan khusus. Pertama, anak yang berada dalam keadaan darurat yaitu pengungsi anak, anak yang berada dalam konflik bersenjata. Kedua, anak yang mengalami konflik hukum, yang menyangkut soal: administrative pengadilan anak, perenggutan kebebasan anak, penjatuhan hukuman terhadap anak, pemulihan kondisi fisik dan psikologis anak. Ketiga, anak dalam situasi eksploitasi yang meliputi Eksploitasi ekonomi, penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang, eksploitasi kekerasan seksual, penjualan, perdagangan, penculikan anak, dan eksploitasi dalam bentuk lainnya. Keempat, anak-anak dari kelompok minoritas dan masyarakat adat. Pada kasus tsunami di Aceh kali ini, anak-anak yang berada pada kelompok satu yang akan dibahas.

Anak-anak menjadi salah satu kelompok yang paling rentan terkena dampak bencana besar seperti ini. Dibandingkan dengan orang dewasa, fisik dan mental anak-anak yang masih masuk dalam masa pertumbuhan dan masih bergantung pada orang dewasa menjadi alas an kerentanan mereka. Bahkan untuk orang dewasa sekalipun, mengalami kejadian traumatis dan mengerikan seperti tsunami di Aceh bias berakibat stress mendalam, bagaimana dengan anak-anak yang notabenenya masih hidup bergantung pada orang dewasa. Rasa trauma pada diri anak-anak akibat pengalaman bencana alam bias berdampak buruk bagi mental dan social anak hingga dewasa kelak bila tidak ditangani.

Di Indonesia terdapat beberapa pengertian anak yang berlaku sesuai dengan peraturan perundang-undangan:

1. Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak-Anak adalah orang yang dalam perkara Anak Nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.
2. Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak dinyatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
3. *Convention On The Rights Of Child* (1989) yang telah diratifikasi pemerintah Indonesia melalui Keppres Nomor 39 Tahun 1990 disebutkan bahwa anak adalah mereka yang berusia 18 tahun kebawah.
4. UNICEF mendefinisikan anak sebagai penduduk yang berusia 0 sampai dengan 18 tahun.

Pada beberapa pengertian anak diatas dapat disimpulkan bahwa anak adalah seseorang yang berusia 0 sampai dengan umur 18 tahun. Penduduk yang masuk dalam kategori usia 0-18 tahun memiliki hak-haknya tersendiri, yang berbeda dengan usia lain, dan harus dipenuhi, dikarenakan kebutuhan dan kewajiban seseorang pada setiap kategori umurnya berbeda-beda. Dalam rangka mewujudkan salah satu tujuan Pemerintah Negara Indonesia tersebut yaitu memberikan perlindungan dan kesejahteraan bagi anak, sebagaimana yang tercantum dalam amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28B ayat (2). Ketentuan yang ada pada pasal 28B ayat 2 yang berbunyi “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.” mengandung arti bahwa setiap anak mempunyai hak untuk dilindungi baik dari eksploitasi ekonomi dan bekerja pada pekerjaan yang membahayakan atau hal-hal yang mengganggu jalannya pendidikan anak, dan hal-hal yang merusak kesehatan fisik, mental, spiritual, moral serta perkembangan sosial anak. Pembinaan kesejahteraan untuk anak-anak termasuk pemberian kesempatan untuk mengembangkan haknya, dalam pelaksanaannya tidak saja merupakan tanggung jawab orang tua mereka, keluarga, bangsa, dan negara melainkan diperlukan pula kerja sama internasional.

Kerjasama Internasional tentu saja dilakukan atas dasar kerja sama dengan negara lain, atau dengan lembaga swadaya yang berasal dari negara lain dan memiliki kantor atau markas sebagai tempat untuk beroperasi dan mengatur segala sesuatunya dalam melaksanakan tugasnya, disuatu negara tertentu. Dalam tulisan kali ini Indonesia dengan UNICEF, memiliki

kerjasama dalam menuntaskan kebutuhan anak-anak didalam negeri. Terlebih, dengan adanya bencana gempa tsunami Aceh, peran UNICEF sangat dibutuhkan dalam memberikan bantuan. Adapun kategori program-program yang dijalankan oleh UNICEF yang dapat meningkatkan perlindungan hak anak:

- a. Melihat pada kasus gempa tsunami di Aceh salah satu jenis program yang dibutuhkan adalah program yang mengupayakan dan mengusahakan anak-anak memiliki akses yang mudah pada pelayanan kesehatan, diantaranya mendapatkan makanan dan minuman bersih, air bersih, pengecekan kesehatan dalam kurun waktu tertentu, tempat tinggal yang layak dan nyaman. Guna meminimalisir dan mengurangi terjangkitnya berbagai penyakit yang menyerang mereka. Karena dalam kondisi pasca bencana alam tubuh, terutama pada anak-anak dibawah umur, sangat rentan terkena penyakit.
- b. Banyak yang memanfaatkan kesempatan pasca bencana alam untuk dengan suka-suka mengambil anak-anak yang kehilangan identitas untuk kemudian dipekerjakan yang tidak sesuai kebutuhan dan umur mereka. Oleh karena itu dibutuhkan program yang mengupayakan hak-hak perlindungan anak, yang mengusahakan anak-anak mendapatkan perlindungan dari eksploitasi ekonomi dan sosial, diskriminasi, tindakan sewenang-wenang, dan kelalaian dalam bagaimana seharusnya memperlakukan dan merawat anak didalam kehidupan sehari-hari. Hak ini berlaku juga untuk anak cacat mental, fisik, pengungsi, yatim piatu, anak dalam perang dan yang mengalami masalah hukum.
- c. Sebuah bencana alam tidak lantas menghalangi anak-anak untuk melanjutkan pendidikannya. Untuk itu program yang mengupayakan hak-hak tumbuh kembang anak dalam bidang pendidikan juga diperlukan. Diperlukan program UNICEF yang dapat memberikan kesempatan kepada setiap anak untuk mengembangkan prestasi secara penuh.
- d. Program yang mengupayakan hak-hak partisipasi, yaitu program yang memberi kesempatan bagi setiap anak untuk berpartisipasi dalam keluarga, kebudayaan, dan kehidupan sosial. Program seperti ini sangat dibutuhkan untuk era sekarang mengingat sudah banyak anak yang ingin mengeksplorasi dirinya lebih dan lebih lagi, ditambah hak individu untuk bersuara sudah banyak disuarakan.

Jenis-jenis bantuan diatas yang kemudian diwujudkan dan direalisasikan oleh UNICEF menjadi program-program untuk perlindungan anak-anak, termasuk yang ada di Aceh. Konflik

yang muncul akibat bencana tsunami di Aceh dapat dilihat pada adanya perubahan relasi gender di lingkungan masyarakat. Misalnya seperti perempuan yang bertahan dan hidup seorang diri, dan harus berganti peran demi meneruskan hidup, beradaptasi dengan kondisi barunya.

Kondisi anak-anak korban tsunami Aceh

Hasil kajian tentang dampak tsunami terhadap anak menunjukkan bahwa lebih dari 2.853 anak yang terpisah dari keluarganya karena tsunami (data *Interagency Group on Family Tracing and Reunification*). Ribuan anak terlantar di panti-panti yang tersebar di Aceh dan wilayah lain di Indonesia, umumnya, masih tersisa salah satu dari orangtua mereka dan 85% diantaranya tinggal di panti/dayah. Aceh memiliki suatu mekanisme pengasuhan anak di Dayah dan Pesantren yang cukup kuat.

Beberapa bulan setelahnya, tepatnya pada peringatan hari anak nasional, Februari 2005 psikolog pemerhati anak sekaligus Ketua Lembaga Perlindungan Anak, Seto Mulyadi mengingatkan bahwa permasalahan pada masa anak harus segera diselesaikan sebab pengalaman pada masa kanak-kanak memiliki pengaruh yang kuat pada pola kehidupan yang akan mereka jalani di masa dewasa, umumnya ingatan yang terbentuk kuat karena suatu peristiwa pada anak-anak akan terbawa dan teringat hingga masa tuanya. Anak-anak korban tsunami di Aceh dan sekitarnya, hendaknya mendapatkan intervensi yang tepat untuk permasalahan-permasalahan psikologisnya agar tidak menjadi hambatan dan mereka tidak mengalami gangguan perilaku di masa dewasa.

Pada permasalahan gempa tsunami Aceh, banyak dari anak-anak yang mengalami perubahan. Selain perubahan fisik yang terlihat nyata, ternyata perubahan psikis juga terjadi pada mereka. Banyak permasalahan yang dialami oleh mereka yang merupakan tim pemberi bantuan dalam menangani anak-anak. Perubahan keadaan menjadi faktor utama yang berpengaruh. Yang biasanya seorang anak memiliki rutinitas seperti sekolah dan bermain, pasca terjadinya musibah tersebut mereka harus beradaptasi dengan situasi yang baru. Pemerintah Indonesia sendiri juga memiliki tujuan tersendiri untuk melayani hidup bagi para penerus bangsa.

Selang dua tahun setelah berlalu peristiwa gempa tsunami, masih belum terlihat pembangunan pada anak-anak yang memadai, khususnya seperti dalam hal psikologis dalam diri anak-anak dan remajanya. *Aceh media center*, pada tanggal 4 Oktober 2006 menyebutkan bahwa kondisi anak-anak dan remaja di Aceh banyak yang belum mendapatkan kegiatan belajar mengajar di sekolah dengan baik, dan masih banyak yang belum kembali bersekolah. Terlepas dari kondisi anak-anak disana, pada dasarnya pendidikan merupakan sebuah hal penting yang harus didapat oleh anak-anak dengan usia dibawah 18 tahun.

Di Aceh banyak anak dan remaja yang sampai saat ini masih belum dapat melanjutkan sekolah mereka. Abdul Jalil dari HMI Meulaboh Perduli Pendidikan mengatakan Rizal (salah satu nama korban Tsunami di Aceh) mendapat kesempatan berharga karena di Aceh sendiri ada sekitar 40 ribu anak putus sekolah akibat bencana tsunami. Dan menurut Abdul Jalil banyak dari mereka masih memiliki orang tua tetapi kehilangan mata pencaharian sehingga tidak dapat membiayai sekolah. Saat ini (pada tahun 2005) menurut pantauan HMI Meulaboh Perduli Pendidikan, sebagian besar bantuan pendidikan yang diterima Aceh masih berupa bantuan fisik seperti buku pelajaran, bangku dan gedung sekolah, serta tenaga pengajar. Sementara bantuan biaya pendidikan dan tawaran beasiswa sangat terbatas.

Dikutip dari harian kompas, yang ditulis oleh Amrizal, pada 28 Desember 2006, menjelaskan bahwa masyarakat Aceh khususnya anak dan remaja Aceh belum mampu kembali pada kehidupan normalnya. Lely Juhari selaku juru bicara Unicef di Aceh pada tanggal 22 Desember 2006 menyatakan bahwa berdasarkan informasi Badan Pusat Statistik (BPS) NAD masih ada sekitar 161.751 anak usia sekolah (SD sampai SMA) yang tidak bersekolah. Antara News, Kamis 27 September 2007 menuliskan penjelasan *general manager* kandatel Nangroe Aceh Darussalam (NAD) Zarwilis Yunus yang memaparkan bahwa jumlah pengguna jaringan internet tumbuh pesat di sejumlah kabupaten dan kota Nangroe Aceh Darussalam. Sementara itu Jawa Pos, Rabu 12 Nopember 2008, menyebutkan bahwa perpustakaan yang dibangun dan dikembangkan untuk anak-anak dan remaja Aceh belum banyak dikunjungi.

Padahal, dengan melakukan proses belajar formal, seperti bersekolah, dapat membantu remaja menemukan identitas dirinya. Usia remaja, sebagai salah satu masa perkembangan yang harus dilalui setiap orang, memiliki ciri berbeda dari masa-masa perkembangan yang lain. Dimana masa remaja adalah periode krisis dalam tumbuh kembang seseorang, bagaimana

melalui masalah, mulai labil dalam menentukan pilihan, mampu atau tidak menyelesaikan masalah-masalah tersebut. Jika semuanya bisa dilalui maka remaja tersebut dapat dikatakan normal. Pendidikan merupakan hal yang sangat dibutuhkan oleh anak-anak.

Selain permasalahan diatas yang menggambarkan kondisi tentang kebutuhan akan pendidikan bagi anak-anak di Aceh pasca tsunami, terdapat pula masalah kesehatan. Hak anak atas kesehatan ternyata juga tersambung pada hak-hak kesejahteraan bagi anak. Sehubungan dengan itu, negara menjamin bahwa apabila anak tidak memiliki keluarga dan membutuhkan bantuan, maka negara akan menjamin dan memberikan perlindungan hukum sebagaimana disebutkan di dalam UUD 1945 pasal 28 B ayat 2 *jo* Pasal 28 A sebagai landasan konstitusional. Tujuan dari pemerintah sendiri dalam melindungi hak anak atas kesehatan bagi anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. Lingkup perlindungan hukum bagi anak mencakup perlindungan terhadap kebebasan anak, perlindungan terhadap hak asasi anak dan perlindungan hukum terhadap semua kepentingan anak yang berkaitan dengan kesejahteraan.

Institusi kesehatan yang berada di Banda Aceh mengalami kerusakan atau tidak berfungsi, baik Dinas Kesehatan Provinsi, Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, Rumah Sakit dan Puskesmas. Bangunan sarana kesehatan, alat kesehatan, dan fasilitas lain umumnya rusak tertimbun lumpur dan kotoran akibat terbawa arus Tsunami di halaman dan lantai. Hal serupa juga terjadi pada KKP (Kantor Kesehatan Pelabuhan) Banda Aceh dan Lhokseumawe dan institusi kesehatan lainnya. Hal ini menyebabkan permasalahan “kolaps”nya penyelenggaraan sistem kesehatan lokal dan subsistem-subsistem dalam mendukung upaya kesehatan setempat baik promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif. Wabah penyakit yang menular justru bisa menjadi pembunuh kedua bagi para korban tsunami di Aceh selain penyakitnya itu. Tidak dipungkiri memang buruknya sanitasi, kesulitan air bersih, ditambah membusuknya para mayat yang belum dievakuasi juga akan membawa berbagai macam penyakit. Himbauan oleh beberapa pihak termasuk WHO bagi para relawan juga sangat menyarankan supaya penanganan pertama adalah memerhatikan sanitasi dan kebersihan air. Penyakit yang bertumpuk bisa menjadi celaka sendiri bagi mereka yang hidup disekelilingnya.

Diantara penyakit yang banyak menyerang para korban Tsunami di Aceh adalah kolera, paru-paru, diare, malaria, dan disentri. Penyakit-penyakit tersebut menjadi beberapa penyakit yang mendominasi para korban tsunami di Aceh. Menyerang paru-paru, penyakit pneumonia atau yang biasa disebut dengan infeksi paru-paru banyak terjadi karena korban yang terlalu banyak menelan air laut dan lumpur. Tingginya gelombang air yang menimpa wilayah Aceh saat Tsunami menyebabkan warga banyak menelan air laut, selain itu keadaan wilayah yang banjir, tidak segera surut juga menyebabkan warga banyak yang tanpa sengaja menelan lumpur. Dan keadaan pada saat itu, tidak semua rumah sakit bisa beroperasi tepat saat bencana tersebut berhenti, ditambah keterbatasan ahli paru-paru untuk membantu para korban. Kesulitan penyedotan lumpur dari tubuh korban juga menjadi hambatan bagi tim medis. Selain infeksi paru, diare dan kolera juga menjadi suatu penyakit yang berhubungan satu sama lain. Penyakit kolera disebabkan oleh makanan yang dikonsumsi, hal ini bisa saja karena keterbatasan makanan untuk bertahan hidup sehingga parakorban tidak memperdulikan apa saja yang mereka konsumsi. Selain itu kolera juga disebut sebagai penyakit diare akut. Kolera tumbuh didalam lingkungan endemis, dalam kasus kali ini kondisi Aceh pasca tsunami dapat dikatakan sebagai suatu wilayah endemis dimana penyakit itu menyerang suatu wilayah dan sekelompok orang yang dimaksudkan dengan kalangan para korban Tsunami Aceh.

Selain kesehatan fisik, ternyata kesehatan jiwa cukup mengganggu anak-anak korban tsunami Aceh. Dilaporkan oleh Tim medis Jepang (JDR) bahwa tidak terjadi epidemic penyakit di kalangan pengungsi tsunami di Aceh. Sebaliknya yang terjadi adalah peningkatan kasus gangguan psikologis. Gangguan psikologis misalnya, insomnia, kecemasan, sakit kepala, palpitasi dan hipertentilasi. Kondisi ini menyebabkan RS Jiwa Banda Aceh masih membutuhkan tenaga dokter jiwa, perawat dan tenaga gizi.

Selain masalah dalam hal pendidikan dan kesehatan, terdapat pula suatu masalah rumit lain yang dihadapi penduduk yaitu adalah status hukum yang tidak jelas. Misalnya soal kepemilikan tanah. Karena banyak orang tewas dan banyak dokumen resmi musnah, banyak orang sekarang tidak bisa membuktikan hak miliknya atas tanah atau bangunan. Terutama anak-anak yang kehilangan orangtua menghadapi masalah pelik, kata Martin Kessler, koordinator organisasi bantuan Diakonie. Bersama-sama dengan organisasi lokal "Kata Hati", mereka kini membangun rumah untuk sekitar 70 keluarga yang mengangkat anak yatim piatu.

Kesulitan para anak yatim piatu adalah, menurut hukum Indonesia seseorang yang belum dewasa tidak bisa memiliki tanah atau bangunan. "Kata Hati" berusaha berunding dengan pemerintahan lokal agar anak-anak itu tetap bisa mempertahankan hak miliknya. Jadi mereka bisa menyewakan rumahnya dan pemasukan dari sewa rumah bisa digunakan untuk membiayai pendidikan anak-anak itu. Sekalipun uang sewa masuk untuk pembiayaan anak-anak yatim, tapi dirasa tidak akan berhasil secara maksimal mengingat jumlah korban yang terlalu banyak. Selain itu, dalam jarak waktu dekat pengadaan persewaan rumah pasti membutuhkan tenaga yang cukup kuat untuk mengumpulkan hasil dana tersebut. Jika sudah masuk usia dewasa dan memiliki beberapa hak berbeda, seperti mereka lebih dipandang boleh mendapatkan ijin memiliki tanah, maka orang-orang dewasa akan lebih mudah mendapatkan akses perihal masalah hukum tersebut dibandingkan dengan anak-anak.

Upaya UNICEF dalam pemenuhan hak anak korban tsunami Aceh

Dalam sejarah, konsep *Human Security* erat kaitannya dengan laporan UNDP yaitu *Human Development Report (HDR)*, dipublikasikan tahun 1994. Dalam laporan tersebut, diperkenalkan konsep *Human Security* yang lebih dijelaskan yaitu menyamakan keamanan dengan manusia, daripada wilayah dan dengan pembangunan daripada militer. Didalam konsep ini juga mengkaji keamanan manusia baik dalam konteks nasional maupun internasional. Bahwa mereka yang menjadi korban bencana alam, yang kemudian terpisah dengan keluarganya, dan kondisi pasca peristiwa tersebut adalah bertahan hidup, melindungi diri sendiri, adalah mereka yang keamanannya terancam, dan merasa tidak aman. Dari adanya rasa tidak aman ini, sehingga membutuhkan bantuan, atau segala sesuatu yang dapat menunjang hidupnya, membutuhkan pembangunan untuk dirinya dan lingkungannya. Amartya Sen, juga memiliki pendapat bahwa *Human Security* dan pembangunan merupakan dua hal yang sama. Dalam kasus tsunami Aceh, antara *Human Security* dan pembangunan, kedua hal tersebut saling berkaitan, ketika diwujudkan maka mereka akan saling memperkuat dan mengarah kepada terciptanya lingkungan hidup yang jauh lebih kondusif. Dari kesadaran akan masalah *human security* ini maka munculan aksi-aksi kemanusiaan yang dilakukan dalam upaya pemenuhan hak anak para korban tsunami di Aceh.

Beberapa upaya yang dilakukan oleh UNICEF yaitu membangun mitra kerjasama dengan pihak lain, guna mempermudah, memperlancar, dan menjadikan lebih ringan proses

pembangunan yang dilakukan. Salah satu yang bekerja sama dengan UNICEF adalah BRR Aceh-Nias yang didirikan oleh pemerintah pada masa pemerintahan presiden Susilo Bambang Yudoyono. Ada beberapa hal yang tidak bisa dengan sembarang UNICEF lakukan disebuah wilayah. Maka dari itu perlu adanya obrolan dengan pihak setempat, berkaitan dengan pembangunan apa yang akan dilakukan, bagaimana prosesnya, dan lain sebagainya. UNICEF dalam kerjasamanya dengan BRR (Badan Rekonstruksi dan Rehabilitasi Aceh-Nias) mengambil langkah maju dengan menandatangani daftar yang sudah direvisi mengenai 346 lokasi sekolah yang dibangun. Komitmen dari UNICEF untuk membangun sekolah tahan gempa patut dipuji, selain tahan gempa sekolah-sekolah yang dibangun oleh UNICEF dengan mitranya juga bersifat sekolah ramah anak, yang tersebar luas di 346 lokasi. Penandatanganan secara resmi ini merupakan perealisasi serta tindak lanjut dari adanya kesepakatan diawal antara UNICEF dengan BRR yang berlangsung pada September 2005. Upacara atas perayaan ini diadakan di SDN 17 kecamatan Sukareja. Pada acara ini UNICEF secara simbolis menyerah terimakan 52 gedung sekolah permanen yang telah selesai dibangun. Selain itu pengadaan kampanye *Back to School* dimana UNICEF melakukan kolaborasi antara *Save the Children*, *World Vision*, *The International Rescue Committee*, *AusAid*, *USAID*, dan beberapa badan lainnya. dari kerjasama yang melahirkan kampanye ini memiliki tujuan yaitu memungkinkan mereka yang selamat dari tsunami agar dapat melanjutkan pendidikan yang mereka dapatkan sebelumnya walaupun sedang berada ditengah-tengah kekacauan.

Peran UNICEF dalam memulihkan sektor kesehatan dan gizi dan meningkatkan layanan kesehatan dasar telah difokuskan pada pembangunan atau peningkatan fasilitas kesehatan; pelatihan pendukung untuk staf kesehatan dan memperluas jangkauan mereka; menyediakan perbekalan kesehatan, peralatan dan kendaraan untuk fasilitas kesehatan; dan mendukung formulasi kebijakan kesehatan dan gizi. Hingga saat ini (2006) 53 fasilitas kesehatan telah dibangun atau direnovasi dengan bantuan UNICEF. UNICEF juga mendukung masyarakat dan pekerja kesehatan dalam memantau pertumbuhan lebih dari 1,7 juta anak dan ibu konseling dalam perawatan anak dan nutrisi. Keuntungan dicatat dalam beberapa kasus, seperti di India dan Sri Lanka, di mana proporsi anak-anak yang kekurangan gizi telah menurun secara signifikan. Meningkatkan gizi anak tidak hanya akan memakan waktu tetapi juga tindakan berkelanjutan pada isu-isu lama seperti meningkatkan gizi ibu dan meningkatkan pendapatan dan ketahanan pangan di antara orang miskin.

Selain program-program penyembuhan yang dilakukan oleh UNICEF dalam upaya pertolongan terhadap anak-anak, UNICEF juga melakukan perbaikan dalam hal air dan sanitasi. Tsunami menghancurkan 85 persen jaringan air dan sanitasi yang sudah tidak memadai di wilayah-wilayah tertentu. Infrastruktur lokal juga membutuhkan pasokan air, sanitasi, distribusi listrik, dan lainnya. Bencana ini menyebabkan kontaminasi air tanah dari sejumlah sumber termasuk air asin, dan saluran-saluran pembuangan, dan beberapa waduk. Adanya perpindahan juga menyebabkan kehilangan fasilitas untuk mandi, dan bersih-bersih.

Dalam hal pendidikan UNICEF mengadakan kampanye *Back to School* dimana UNICEF melakukan kolaborasi antara *Save the Children, World Vision, The International Rescue Committee, AusAid, USAID*, dan beberapa badan lainnya. Tujuan dari kampanye ini adalah memungkinkan mereka yang selamat dari tsunami agar dapat melanjutkan pendidikan yang sebelumnya mereka dapatkan walaupun berada ditengah-tengah kekacauan. Alasannya bahwa melihat pada kondisi anak-anak yang karena kurangnya kegiatan rutin seperti pendidikan formal/sekolah dapat mengganggu jiwa mereka akibat rasa trauma yang didapatkan pasca tsunami Aceh.

Untuk itu pasca terjadinya bencana, didirikanlah sekolah-sekolah tenda bagi anak-anak yang tinggal di tenda-tenda pengungsian. Kemudian UNICEF merekrut dan melatih lebih dari 1.500 tenaga pengajar untuk memulai mengajar pada Juli tahun 2005. Mereka yang menjadi tenaga pengajar disubsidi gajinya selama enam bulan pertama. Selain itu UNICEF juga melakukan latihan *Assesment of Learning Class* diakhir Januari 2005, yang beberapanya sudah diselesaikan pada bulan Maret. UNICEF serta beberapa mitranya juga memulai transisi dari infrastruktur ke pendidikan berkualitas, menggunakan pendekatan CLCC (*Creating Learning Communities for Children*) untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan meningkatkan partisipasi komunitas melalui manajemen berbasis sekolah. Anak-anak difokuskan pada penyediaan ruang belajar dan bermain untuk anak kecil.

Selain proses pembangunan sekolah untuk menyediakan lingkungan belajar bagi para korban, untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan mengurangi putus sekolah, UNICEF mendukung pelatihan guru dan kepala sekolah, yang memungkinkan mereka menciptakan suasana pembelajaran interaktif dan komunikatif untuk anak-anak, terutama di kalangan anak perempuan. UNICEF juga mempromosikan keterlibatan orang tua (dan melalui mereka

masyarakat) dalam manajemen sekolah dan pendidikan anak-anak. Adanya keterlibatan orang tua, sebagai orang yang menjadi alat ketergantungan bagi anak-anak akan sangat berperan besar dalam pemulihan dibidang pendidikan, terutama untuk memberikan dorongan dan motivasi, sehingga keinginan untuk belajar dapat mereka dapatkan dari lingkungan dan orang-orang terdekat mereka.

Terdapat beberapa hambatan dalam proses upaya pemenuhan hak anak korban tsunami Aceh. Hambatan yang ditemui ada pada proses pembangunan dibidang pendidikan dan juga kesehatan.

- Dalam bidang pendidikan, pembangunan sekolah tetap membutuhkan waktu lebih lama dari yang diharapkan untuk memasukkan konsultasi masyarakat dan tender transparan dan mencari tenaga terampil untuk memenuhi standar. Kebutuhan anak-anak akan pendidikan memang menjadi pertimbangan yang patut dipertimbangkan. Walaupun telah didirikan sekolah sementara seperti di tenda-tenda pengungsi, namun tetap saja, sekolah tetap serta metode pembelajaran yang memenuhi standar yang dibutuhkan oleh anak-anak. Dalam kondisi pasca tsunami yang melihat kondisi dari segala akses mengalami kelumpuhan justru bukan hal yang mudah dalam menemukan tenaga terampil dalam waktu cepat. Mereka yang bekerja sebagai relawan tidak bisa diandalkan selamanya untuk menetap dan menjadi tenaga kerja pendidik di Aceh. Walau begitu upaya dalam melakukan pelatihan tetap dilakukan guna memenuhi kebutuhan anak-anak.
- Keterampilan pemerintah daerah, kepegawaian dan pengalaman masih membutuhkan penguatan. Dalam mengembangkan semua program untuk kemajuan-kemajuan selanjutnya tetap menjadi tantangan. Sama halnya seperti dalam bidang pendidikan. Dalam situasi seperti ini, untuk mengumpulkan sumber daya manusia yang mumpuni dan siap membawa perubahan secara cepat memang sulit ditemui. Mereka yang menjadi korban masih membutuhkan banyak penguatan setelah mengalami kehilangan secara besar-besaran.
- Transportasi masih menjadi masalah karena banyak jalan baru yang belum dibangun, menghambat transportasi bahan bangunan berat, akses masyarakat ke layanan dasar dan pemantauan program. Hal ini cukup menjadi hambatan yang berat di hampir seluruh

bantuan, pasalnya kebutuhan akan akses jalan yang baik merupakan kebutuhan nomor satu dalam proses perbaikan di Aceh.

- Lingkungan politik masih rapuh sebelum pemilihan Desember 2006 untuk gubernur Aceh pertama yang terpilih secara demokratis.

Anak-anak yang rentan yang tinggal di daerah konflik sebelumnya harus diyakinkan akan manfaat yang setara dengan anak-anak yang terkena dampak tsunami lainnya. Anak-anak yang banyak mengalami kehilangan juga membutuhkan bantuan ekstra untuk memulihkan kembali semangat didalam dirinya. Selain itu, masih banyak juga anak-anak yang membutuhkan bimbingan untuk menentukan arah hidup kedepannya. Perbekalan yang dibutuhkan seperti ilmu yang tinggi, ilmu juga tidak melulu soal bangku sekolah, melainkan bagaimana mempersiapkan diri untuk bertahan hidup dan merencanakan hidup jangka panjang.

Kesimpulan:

UNICEF hadir dan terjun langsung ke lapangan untuk menolong anak-anak korban tsunami Aceh. Fokus pada perlindungan anak, dibuktikan dalam aksinya menolong korban tsunami di Aceh pada tahun 2004. Kejadian itu berlangsung diakhir tahun, tepatnya tanggal 26 Desember. Ketika bencana itu selesai terjadi, yang tersisa di tanah Aceh hanya keporakporandaan. Kerusakan infrastruktur disana-sini. Rumah-rumah yang merata dengan tanah dan tumpukan mayat yang berserakan juga menjadi pemandangan yang tidak terelakkan. Nasib buruk pada anak-anak juga menjadi suatu tujuan UNICEF dalam memberikan bantuan. Banyak anak-anak yang kehilangan orang tuanya, kehilangan sanak saudaranya, bahkan setelah selamat banyak juga anak yang akhirnya hidup sebatang kara. Banyak juga kasus dimana anak-anak terpisah dari orang tua dan sanak saudaranya. Kejadian seperti ini memunculkan suatu kondisi baru bagi mereka, perubahan lingkungan secara spontan tentu saja menjadikan mereka pribadi yang berbeda. Perlunya adaptasi untuk kehidupan baru mereka. Kondisi anak-anak pada saat itu, banyak yang terganggu secara psikologis. Anak-anak yang notabeneanya membutuhkan orang lebih dewasa untuk dijadikan alat ketergantungan mendadak hidup sendiri, selain itu kegiatan rutin sehari-hari yang biasa dilakukan juga berubah total. Tidak ada lagi sekolah, tidak ada lagi lahan untuk bermain, tidak ada lagi rumah sebagai tempat berlindung. Keadaan pasca tsunami ini menjadi ancaman bagi mereka, khususnya anak-anak korban tsunami Aceh untuk mendapatkan rasa aman.

Upaya pertama yang dilakukan adalah membangun mitra kerjasama dengan beberapa pihak, tujuannya agar mempermudah kerja serta proses pembangunan yang dilakukan oleh UNICEF di Aceh. Salah satu mitranya ada BRR, badan yang dibangun oleh pemerintah untuk penanganan kasus tsunami di Aceh.

Dalam isu kesehatan pasca bencana, banyak penyakit yang terjangkit kedalam tubuh anak-anak. Diantaranya seperti kolera, akibat lingkungan yang kurang bersih dan makanan-makanan yang sembarangan masuk kedalam tubuh karena untuk bertahan hidup. Setelah itu ada penyakit pneumonia, atau biasa disebut dengan infeksi paru-paru. Penyakit ini banyak menyerang anak-anak karena terlalu banyak menelan lumpur saat terjadinya kejadian tersebut. Apa yang dilakukan UNICEF dalam bidang kesehatan? Pasca kejadian tersebut UNICEF melakukan “Aksi Tanggap Darurat” yang menghasilkan dana sebesar 336 juta dolar AS. selain itu melakukan peningkatan fasilitas kesehatan; pelatihan pendukung untuk staf kesehatan dan memperluas jangkauan mereka; menyediakan perbekalan kesehatan, peralatan dan kendaraan untuk fasilitas kesehatan; dan mendukung formulasi kebijakan kesehatan dan gizi. Dalam kurun waktu dua tahun setelah bencana alam tersebut, sudah lebih dari 6.500 staf kesehatan dan bidan di 21 kabupaten dilatih tentang pengelolaan penyakit anak-anak, kesehatan reproduksi dan persiapan lokasi klinis.

Dalam bidang pendidikan UNICEF membangun sekolah-sekolah darurat di tenda-tenda pengungsian. Selain itu melakukan perekrutan terhadap banyak pengajar untuk mengajar di Aceh. Pada tahun-tahun berikutnya dibangun sekolah-sekolah sementara, hingga sekolah-sekolah tetap untuk mengembalikan keadaan mereka dapat beraktifitas seperti semula. Selain pembangunan sekolah-sekolah UNICEF juga melakukan pembangunan taman kanak-kanak bagi mereka yang masih ada di usia dini. Dalam hal peningkatan kualitas tenaga kerja, selain perekerutan guru, pada tahun-tahun selanjutnya UNICEF mengadakan pelatihan guru dan kepala sekolah, yang memungkinkan mereka menciptakan suasana pembelajaran interaktif dan komunikatif untuk anak-anak.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Bajpai, K 2000, Human Security: Concept and Measurement, Jawaharlal Nehru University, New Delhi.
- Nasional, Menteri Pendidikan. (2009). *Pedoman Umum EYD*. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional.
- Rudy, T. M. (1993). *Administrasi dan Organisasi Internasional*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Suharto, E. (2006). *Filosofi dan Peran Advokasi Dalam Mendukung Pemberdayaan Rakyat*.
- Suharto, E. (2009). *Pekerjaan Sosial di Dunia Industri*. Bandung: Alfabeta.
- Suharto, E. (2010). *Analisis Kebijakan Publik: Panduan Praktis Mengkaji Masalah dan Kebijakan Sosial*. Bandung: Alfabeta.

Jurnal

- Iqbal, M. (2007). Kekerasan Terhadap Anak. *Jurnal Ilmiah Mondial Ilmu-ilmu Sosial dan Kemasyarakatan*, 53.
- Fitrah, E.. (2015). Gagasan Human Security dan Kebijakan Keamanan Nasional, 28.
- Koteng, M. Z. (2012). Efektifitas Program Perlindungan Anak Bagi Anak yang Terpisah Pasca Bencana Tsunami di Aceh, 67.
- Srikandi, A.G. (2010). Comprehensive Security and Humanitarian Aid”, *Multiversa: Journal of International Studies* 2 No 1.
- Kurniawan, A. (2008). Pemenuhan Hak Anak Atas Kesehatan di Provinsi NAD di Dasarkan Qanun Nomer 11 tahun 2008 Tentang Perlindungan Anak. *Jurnal Dinamika Hukum*, 188.

Laporan

- Agus Suwandono, A. H. (2005). Akibat Bencana Tsunami Terhadap Pelayanan di Provinsi NAD . 3-4.
- Anna K. Stechert, O. K. (2007). Berita UNICEF Aceh dan Nias. *UNICEF news*, 2.
- Hartini, N. (2009). Bencana Tsunami dan Stres Pasca-Trauma pada Anak. 259.
- United Nations.(2008). *The United Nations in Aceh: 2005 to 2008 and beyond*. 3
- UNICEF. (2004). Hak Anak Atas Perlindungan. 3.

- UNICEF. (2006). *Much Done More To Do*. New York: UNICEF.
- UNICEF. (2007). UNICEF Business Case. *UNICEF Cerita dari Indonesia*, 2.
- UNICEF.(1983). “Literacy, Healt Nutrition and Income”.
- UNICEF.(2008).*Evaluations of UNICEF’s Response in Indonesia*, 15
- UNICEF. (2010).*Penanganan UNICEF terhadap Tsunami Aceh*, hlm 3
- UNICEF.(2006) *The 2004 Indian Ocean Tsunami Disaster: Evaluation of UNICEF’s Response (Emergency and Initial Recovery Phase) – Indonesia*. UNICEF Evaluation Office Evaluation Report, hlm 3
- UNICEF.(2009) “*The Governance of Tsunami Funding at UNICEF*”, 3.
- World Bank. (2005) *Rebuilding a Better Aceh and Nias: Preliminary Stocktaking of the Reconstruction Effort Six Months After the Earthquake and Tsunami*, 99.

Internet

- All in diary. (2017). *Principle and Good Practice of Humanitarian Donorship*. Retrieved Maret 7, 2018, from: (<http://www.allindiary.org/pool/reource/principles-and-good-practice-of-humanitarian-donorship.pdf>)
- Detik.(2005, Januari 2).*Detik*. Retrieved Maret 5, 2018, from detik.com: <https://news.detik.com/berita/d-265855/wabah-penyakit-jadi-pembunuh-kedua-pasca-tsunami>
- Hussein, K. (2018, Maret 9). *Security And Human Security : An Overview Of Concepts And Initiatives. What Implications For West Africa?* Diakses dari OECD: www.oecd.org
- KBBI. (1991). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Retrieved April 6, 2017, from kbbi.wed.id
- Kompas. (2014, Desember 25). *Kompas*. Retrieved Maret 30, 2018, from nasional.kompas.com: <https://nasional.kompas.com/read/2014/12/25/18191481/Unicef.Puji.Pembangunan.Aceh.Pasca-tsunami>
- Multazam. (2013, Maret 29). *Sejarah Panjang Berdirinya UNICEF*. Retrieved April 6, 2017, from Tenda Sejarah: <http://www.tendasejarah.com/2013/03/sejarah-panjang-berdirinya-unicef.html>
- Multazam. (2013, Maret 29). *Tenda Sejarah*. Retrieved April 6, 2017, from Sejarah Berdirinya UNICEF Lengkap: <http://www.tendasejarah.com/2013/03/sejarah-panjang-berdirinya-unicef.html>
- Sejarah, T. (2013, Maret 29). *Portal Sejarah Terlengkap*. Retrieved April 6, 2017, from www.tendasejarah.com
- New Press. (2000 Mei 8). *Secretary General Salutes International Workshop on Human Security in Mongolia, Two Dat Session in Ulaanbaatar*. Retrieved April 7, 2018, from: <http://www.un.org/News/Press/docs/2000/20000508.sgsm7382.doc.html>

- Global Humanitarian Assistance. (2017). *Global Humanitarian Assistance, Defining Humanitarian Aid*. Retrieved Maret 7, 2018, from:<http://globalhumanitarianassistance.org/data-guides/defining-humanitarian-aid>.
- UNESCO. (2016). *Human Security: Approaches and Challenges*. Retrieved Maret 9, 2018, from:<http://www.unesco.org>.
- UNICEF. (2008). *Global Sejarah Singkat UNICEF di Indonesia*. Retrieved Februari 3, 2018, from:http://www.unicef.org/indonesia/id/overview_3108.html.
- UNICEF (2008). *Memperbaharui Kembali Janji Kami Kepada Kelangsungan Hidup dan Perkembangan Ibu dan Anak*. Retrieved Februari 3, 2018, from https://www.unicef.org/indonesia/id/health_nutrition.html.
- UNICEF (2008). *Mengurangi Risiko HIV dan Melindungi Mereka yang Telah Terjangkit*. Retrieved Februari 4, 2018, from https://www.unicef.org/indonesia/id/hiv_nutrition.html.
- UNICEF (2008). *Pendidikan*. Retrieved Februari 3, 2018, from https://www.unicef.org/indonesia/id/education_nutrition.html.